

# BAB I PENDAHULUAN

## I.1 Latar Belakang

Di era globalisasi saat ini penggunaan laporan keuangan sebagai media pertanggung jawaban kinerja perusahaan kepada pihak pemegang saham haruslah di sajikan secara wajar. Laporan keuangan yang wajar adalah laporan keuangan yang memenuhi Standar Akuntansi Keuangan. Namun kenyataannya semakin berkembangnya dunia usaha yang makin kompleks dan bervariasi membuat kemajuan di bidang ekonomi diiringi dengan munculnya berbagai jenis tindakan *fraud*, seperti melakukan manipulasi penyajian laporan keuangan.

Kecurangan laporan keuangan merupakan kejahatan yang dilakukan secara pribadi maupun berkelompok untuk kepentingan pelaku. Kecurangan laporan keuangan sendiri merupakan kejahatan yang paling sering dilakukan. Secara global fenomena kecurangan ini terjadi di sektor publik maupun swasta. *Association of Certified fraud examiner (ACFE)* mengungkapkan bahwa secara global pada tahun 2012 ditemukan sebanyak 1.388 kasus kecurangan yang mana khusus di Indonesia ditemukan sebanyak 20 kasus kecurangan. Dimana kasus kecurangan ini dilakukan dengan motif melakukan penjarahan aset sebagai posisi tertinggi dengan angka 86,7%, kemudian di posisi kedua kasus korupsi sebesar 33,4% dan manipulasi laporan keuangan sebesar 7,6% sepanjang tahun 2012 (Tuanakotta, 2013).

Berdasarkan data *Corruption Perception Index (CPI)* pada tahun 2016 Indonesia menempatkan diri sebagai negara dengan level korupsi yang tinggi. Berdasarkan hasil survey yang dilakukan oleh *Transparency International* dalam data CPI tahun 2016 Indonesia menempati posisi ke 90 dari 176 negara di dunia dengan skor 37 dari skala 0-100 (0 berarti sangat korup dan 100 berarti sangat bersih). Di Indonesia peringkat pertama korupsi terjadi di kalangan birokrasi, DPRD dan kepala daerah. Bentuk korupsi yang dilakukan bukan lagi sekedar manipulasi uang transport, hotel dan uang saku, tetapi tender proyek fiktif

pemerasan, *mark up* pengadaan barang hingga pengelakan pajak. Fariz (2017) dalam Wiralestari (2017).

Terjadinya suatu kecurangan adalah tindakan yang di sengaja, apabila kecurangan itu tidak terdeteksi oleh pengaudit dapat memberikan efek yang merugikan bagi perusahaan itu sendiri. Sebagai contoh kasus yang terjadi pada perusahaan British Telecom. *Fraud* tidak pandang bulu. Perusahaan besar multinasional pun ikut mengalami *fraud*. Sejak awal triwulan kedua 2017 telah muncul isu terjadinya *fraud* akuntansi di British Telecom. Perusahaan raksasa Inggris ini mengalami *fraud* akuntansi di salah satu lini usahanya di Italia. Sebagaimana skandal *fraud* akuntansi lainnya, *fraud* di British Telecom berdampak kepada akuntan publiknya. Tidak tanggung-tanggung kali ini yang terkena dampaknya adalah *Price Waterhouse Coopers* (PwC) yang merupakan kantor akuntan publik ternama di dunia dan termasuk *the bigfour*. Tentu saja dampak *fraud* akuntansi ini bukan saja menyebabkan reputasi kantor akuntan publik tersebut tercemar, namun ikut mencoreng profesi akuntan publik. Padahal eksistensi akuntan publik sangat tergantung pada kepercayaan publik kepada reputasi profesional akuntan publik. British Telecom segera mengganti PwC dengan KPMG. KPMG juga merupakan *the bigfour*.

Relasi PwC dengan British Telecom telah berlangsung sangat lama, yaitu 33 tahun sejak British Telecom di privatisasi 33 tahun yang lalu. *Board of Director* British Telecom merasa tidak puas atas kegagalan PwC mendeteksi *fraud* akuntansi di Italia. *Fraud* akuntansi ini gagal dideteksi oleh PwC. Justru *fraud* berhasil dideteksi oleh pelapor pengaduan (*whistleblower*) yang dilanjutkan dengan akuntansi forensik oleh KPMG. Modus *fraud* akuntansi yang dilakukan British Telecom di Italia sebenarnya relatif sederhana dan banyak dibahas di literatur kuliah auditing namun banyak auditor gagal mendeteksinya yakni melakukan inflasi (peningkatan) atas laba perusahaan selama beberapa tahun dengan cara tidak wajar melalu kerja sama koruptif dengan klien-klien perusahaan dan jasa keuangan. Modusnya adalah membesarkan penghasilan perusahaan melalui perpanjangan kontrak yang palsu dan *invoice*-nya serta transaksi yang palsu dengan *vendor*. Praktik *fraud* ini sudah terjadi sejak tahun 2013. Dorongan untuk memperoleh bonus (tantiem) menjadi stimulus *fraud* akuntansi ini. Dampak

*fraud* akuntansi penggelembungan laba ini menyebabkan British Telecom harus menurunkan GBP530 juta dan memotong proyeksi arus kas selama tahun ini sebesar GBP500 juta untuk membayar utang-utang yang disembunyikan (tidak dilaporkan). Tentu saja British Telecom rugi membayar pajak penghasilan atas laba yang sebenarnya tak ada.

Skandal *fraud* akuntansi ini, sebagaimana biasanya, berdampak kerugian kepada pemegang saham dan investor di mana harga saham British Telecom anjlok seperlimanya ketika British Telecom mengumumkan koreksi pendapatannya sebesar GBP530 juta di bulan Januari 2017. Luis Alvarez, Eksekutif British Telecom yang membawahi British Telecom Italia pun angkat kaki. *Chief Executive Officer* British Telecom Gavin Patterson dan *Chief Financial Officer* Tony Chanmugam dipaksa mengembalikan bonus mereka masing-masing GBP340.000 dan GBP193.000. Beberapa pemegang saham British Telecom segera mengajukan tuntutan kerugian *class-action* kepada korporasi karena dianggap telah mengelabui investor dan tidak segera mengumumkan *fraud* keuangan tersebut.

Saat ini atas *fraud* akuntansi tersebut, penegak hukum Italia sedang melakukan proses investigasi terhadap tiga orang mantan eksekutif dan dua staf British Telecom di Italia. Tuduhan *fraud* dialamatkan kepada Gianluca Cimini – mantan *Chief Executive Officer* British Telecom di Italia yang dianggap paling bertanggung jawab melanggar tata kelola perusahaan terkait permainan dengan vendor dan kontraknya serta perilaku yang mengintimidasi bawahan. Mantan *Chief Operating Officer* Stefania Truzzoli dituduh memanipulasi hasil operasional yang dipakai menjadi dasar pemberian bonus dan memanipulasi informasi hasil kinerja ke korporasi induk (*British Telecomm Europe*). Mantan *Chief Financial Officer* Luca Sebastiani juga menerima tuduhan karena tidak mampu melaporkan *fraud* keuangan dan mendorong pegawainya Giacomo Ingannamorte membuat *invoice* palsu. Luca Torrigiani, mantan staf yang bertanggung jawab kepada klien pemerintah dan klien besar lainnya dituduh melanggar aturan British Telecom dengan memilih *vendor* dan menerima pembayaran dari agen British Telecom Italia. Bagi PwC, masalah ini menjadi yang kedua kalinya menerpa dalam dua tahun belakangan ini setelah Tesco karena gagal memberitahukan ratusan juta poundsterling laba yang hilang. Yang menarik, di Inggris terdapat lembaga

antifraud yaitu *Serious Fraud Office* (SFO) yang melakukan penegakan hukum atas skandal *fraud* termasuk *fraud* oleh atau di korporasi.

Menurut Pusdiklatwas BPKP (2008) mengungkapkan bahwa *fraud* adalah perbuatan melawan hukum atau melanggar hukum yang dilakukan oleh orang-orang dari dalam atau dari luar organisasi dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompoknya secara langsung atau tidak langsung merugikan pihak lain. Menurut Tuannakotta (2014, hlm.277) mengungkapkan bahwa tindakan pencegahan adalah suatu sistem dengan proses dan prosedur yang bertujuan khusus, dirancang dan dilaksanakan dengan tujuan untuk mencegah dan menghalangi (dengan membuat jera) terjadinya *fraud*.

Menurut Priantara (2013, hlm.211) mengungkapkan bahwa tindakan pendeteksian adalah tindakan lanjutan yang dilakukan oleh investor, audit internal, para pengguna lainnya, apabila dicurigai atau ditemukan adanya indikasi kecurangan. Menurut Priantara (2013, hlm.41) menyatakan bahwa audit investigatif adalah audit yang dilakukan dalam upaya pencarian dan pengumpulan data, informasi dan temuan lainnya untuk mengetahui kebenaran atau bahkan kesalahan sebuah fakta.

Penelitian ini selain berdasarkan fenomena yang terjadi, dilatarbelakangi oleh *gap research* yang dilakukan peneliti terdahulu yang masih belum konsisten seperti hasil penelitian yang dilakukan oleh Shinta Prastanti Dewi (2013) menyatakan bahwa tindakan pencegahan tidak berpengaruh terhadap upaya meminimalisasi kecurangan laporan keuangan. Hal ini berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Okoye & Ggebi (2017) menyatakan bahwa tindakan pencegahan berpengaruh signifikan terhadap upaya meminimalisasi kecurangan (*fraud*) laporan keuangan.

Begitu pula dengan tindakan pendeteksian dalam upaya meminimalisasi kecurangan laporan keuangan. Penelitian yang dilakukan oleh Shinta Prastanti Dewi (2013) menyatakan bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan antara tindakan pendeteksian terhadap upaya meminimalisasi kecurangan laporan keuangan. Hal ini berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Fauzan, dkk (2015) menyatakan bahwa tindakan pendeteksian berpengaruh signifikan terhadap upaya meminimalisasi kecurangan (*fraud*) laporan keuangan.

Begitu pula dengan audit investigatif dalam upaya meminimalisasi laporan keuangan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Dede Rahmad (2014) menyatakan bahwa audit investigatif tidak berpengaruh terhadap upaya meminimalisasi kecurangan laporan keuangan. Hal ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Alfian dkk (2017) menyatakan bahwa audit investigatif berpengaruh signifikan terhadap upaya meminimalisasi kecurangan (*fraud*) laporan keuangan.

Karakteristik yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah tahun penelitian dan objek penelitian. Penelitian sebelumnya menggunakan perusahaan BUMN dan dilaksanakan pada tahun 2015. Sedangkan pada penelitian ini menggunakan auditor yang terdaftar sebagai anggota IAPI dan mengikuti acara PPL yang diadakan IAPI dan dilaksanakan pada tahun 2017. Penelitian ini sama dengan penelitian sebelumnya yaitu menggunakan kuisisioner untuk menghitung upaya meminimalisasi kecurangan laporan keuangan.

Berpedoman pada beberapa penelitian terdahulu yang masih menunjukkan ketidak konsistenan antara pengaruh Tindakan Pencegahan, Pendeteksian dan Audit Investigatif terhadap Upaya Meninimalisasi Kecurangan (*Fraud*) dalam Laporan Keuangan. Hal ini mengindikasikan bahwa masih perlunya penelitian lebih lanjut terhadap hubungan antara variabel tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui seberapa besar pengaruh tindakan pencegahan, pendeteksian dan audit investigatif terhadap upaya meminimalisasi kecurangan laporan keuangan. Peneliti akan melakukan penelitian yang diberi judul : “Pengaruh Tindakan Pencegahan, Pendeteksian dan Audit Investigatif Terhadap Upaya Meminimalisasi Kecurangan (*Fraud*) Laporan Keuangan”.

## **I.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian, maka dapat dimunculkan rumusan masalah sebagai berikut :

- a. Apakah tindakan pencegahan berpengaruh terhadap upaya meminimalisasi kecurangan (*fraud*) laporan keuangan ?

- b. Apakah tindakan pendeteksian berpengaruh terhadap upaya meminimalisasi kecurangan (*fraud*) laporan keuangan ?
- c. Apakah audit investigatif berpengaruh terhadap upaya meminimalisasi kecurangan (*fraud*) laporan keuangan ?

### **I.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk membuktikan pengaruh tindakan pencegahan terhadap upaya meminimalisasi kecurangan (*fraud*) laporan keuangan.
- b. Untuk membuktikan pengaruh tindakan pendeteksian terhadap upaya meminimalisasi kecurangan (*fraud*) laporan keuangan.
- c. Untuk membuktikan pengaruh audit investigatif berpengaruh terhadap upaya meminimalisasi kecurangan (*fraud*) laporan keuangan.

### **I.4 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini yaitu :

#### a. Manfaat Teoritis

##### 1) Bagi Peneliti

Dengan melakukan penelitian diharapkan memberikan bukti terkait pengaruh variabel independen tindakan pencegahan, pendeteksian dan audit investigatif terhadap variabel dependen upaya meminimalisasi kecurangan (*fraud*) laporan keuangan.

##### 2) Bagi Mahasiswa

Dapat digunakan sebagai pedoman dan referensi untuk melakukan penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan tindakan pencegahan, pendeteksian dan audit investigatif terhadap upaya meminimalisasi kecurangan (*fraud*) laporan keuangan.

b. Manfaat Praktis

Bagi Kantor Akuntan Publik

Untuk memahami faktor-faktor apa saja yang berpengaruh terhadap tindakan pencegahan, pendeteksian dan audit investigatif terhadap upaya meminimalisasi kecurangan (fraud) dalam laporan.



